

Fitriyah: Pelaku Politik Uang Makin Kreatif

► Bawaslu Jateng Ajak Pemilih Tolak Money Politics Jelang Pilkada 2020

DEMAK, TRIBUN - Praktik politik uang atau money politics dalam Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) semakin hari semakin kabur bentuknya. Dosen FISIP Undip, Fitriyah menyebut, pelaku politik uang makin kreatif untuk menyamarkan pelanggaran Pemilu tersebut, antara lain menggantinya dengan istilah sedekah politik, untuk beli es, dan sebagainya.

"Bahkan beberapa temuan ada juga yang berbentuk e-money dan asuransi. Pikiran politik uang itu dalam masyarakat ada, karena dilarang, maka muncul berbagai bentuk strategi," kata Fitriyah dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Mengikis Politik Uang dalam Pilkada 2020 di Hotel Amantis, Demak, Sabtu (23/11).

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah itu menambahkan, praktik politik uang tidak hanya dari strategi para pemenang calon, namun datang

STORY HIGHLIGHTS

- Praktik politik uang atau money politics dalam Pemilu atau Pilkada semakin hari semakin kabur bentuknya
- Pelaku politik uang makin kreatif untuk menyamarkan pelanggaran Pemilu tersebut, antara lain menggantinya dengan istilah sedekah politik atau untuk beli es
- Bahkan ada beberapa temuan money politics yang berbentuk e-money dan asuransi

juga dari pemilih. "Dalam membebaskan politik uang memang tidak bisa dilakukan hanya satu unsur. Dalam regulasi juga tidak semuanya bisa mencakup sehingga sulit dibuktikan dengan hukum positif," kata Fitriyah, yang kata Fitriyah, yang menulis disertasi "Botoh dalam Pilkada, Studi Kasus Dua Daerah di Jawa Tengah", saat menyelesaikan program Doktor Ilmu Sosial, Pasca-

sarjana FISIP Undip, pada 2018.

Oleh karena itu, ia juga menyarankan masyarakat untuk menolak segala praktik politik uang karena diskriminatif dan mengganggu kebebasan berekspresi.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Rofudin mengajak masyarakat untuk jujur dan menolak segala politik uang menjelang Pilkada 2020. Rofudin mengatakan, politik uang yang merusak proses Pemilu dan demokrasi selama ini karena setelah calon yang menggunakan politik uang memimpin, ia masih mempunyai beban untuk mengembalikan modal dan mempengaruhi kebijakan publik.

"Demak dalam hal ini juga merupakan kabupaten yang akan menggelar Pemilu 2020 dari 21 kabu-

paten/kota di Jawa Tengah," katanya.

Ia menambahkan, calon yang biasanya menggunakan politik uang dalam Pemilu dengan modal yang berasal dari pengusaha. Kemudian saat memimpin hanya menjadi bupati/walikota bayangan karena disetir pemilik modal. (ivo)